

Dr. S.F. Marbun, SH, M.Hum.



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN

A. Istilah yang Dipergunakan	1
1. Dalam Peraturan Perundang-Undangan	1
2. Pandangan Para Sarjana	3
3. Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi	4
4. Istilah Asal	5
B. Pengertian dan Cakupan	7
1. Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan	7
2. Arti Hukum Administrasi Negara	9

BAB II : HUBUNGAN HTN DENGAN HAN, KEDUDUKAN, SISTEMATIKA DAN KODIFIKASI

A. Pada Mulanya Adalah Satu	13
B. Perbedaan Pandangan Mengenai HTN dan HAN	14
1. Golongan yang Berpendapat Ada Perbedaan Prinsip	15

2. Golongan yang Berpendapat Tidak Ada Perbedaan Prinsip	18
C. Kedudukan HAN dalam Tata Hukum Indonesia	19
D. Pembagian Hukum Administrasi Indonesia	21
1. Hukum Administrasi Negara Heteronom dan Otonom	21
2. Hukum Administrasi Negara Umum dan Khusus	22
E. Sistematika dan Kodifikasi Hukum Administrasi Indonesia	25

BAB III : SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

A. Pengertian Sumber Hukum	27
B. Sumber Hukum Administrasi Indonesia	31
1. Sumber Hukum Administrasi Indonesia Tertulis	33
2. Hukum Administrasi Indonesia (Umum)	34
3. Hukum Administrasi Indonesia (Khusus)	36
C. Sumber Hukum Administrasi Formil	37
1. Peraturan Perundang-Undangan	37
2. AAUPL Sebagai Sumber Hukum Administrasi Tidak Tertulis	42
3. Yurisprudensi	48
4. Doktrin	53

BAB IV : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DAN TUJUAN NEGARA

A. Tujuan Negara dan Hukum Administrasi Indonesia	55
B. Fungsi Hukum Administrasi Indonesia	58

C. Hukum Administrasi dan Negara Hukum Indonesia serta Demokrasi	60
--	----

BAB V : ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Asas Negara Hukum dan Demokrasi	63
1. Attributif atau Attribusi	70
2. Derivatif	75
3. Delegasi	75
4. Mandat	82
5. Perwakilan	89
6. Kewenangan Bebas, Terikat dan Fakultatif	93
B. Asas Kedaulatan dan Kekuasaan atau Kewenangan Publik	95
C. Asas Opportunitas	101
D. Asas <i>Het Vermoeden van Rechtmatigheid</i> atau Asas <i>Pre Sumtio Justae Causae</i>	103
E. Asas Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan KTUN	106
1. <i>Retroactive</i>	109
2. <i>Revocative</i>	110
3. <i>Abrogative</i>	110
F. Asas Jabatan	116
G. Asas Netralitas dalam Pembuatan Keputusan ..	123
H. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan	124

BAB VI : SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

A. Lembaga-lembaga Negara	127
B. Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat	129
1. Kementerian Negara dan Departemen	129
2. Lembaga Pemerintah Non Departemen	136

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah	139
1. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah	141
2. Organisasi Perangkat Daerah	142
3. Perangkat Daerah Provinsi	143
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	144
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah	145
6. Satuan Polisi Pamong Praja	147

BAB VII : PERBUATAN PEMERINTAH

A. Arti Tindakan Pemerintah	149
B. Macam-macam Perbuatan Pemerintah	149
C. Perbuatan Hukum Menurut Hukum Publik	150
D. Perbuatan Hukum Menurut Hukum Privat	151
E. Penentuan Tugas dan Kewenangan Perundang-Undangan oleh Pemerintah	152
F. Cara-cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah	153
G. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah	154
1. Peristilahan dan Pengertian	154
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum ...	157
3. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat TUN	158
H. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan	161

BAB VIII : INSTRUMEN PEMERINTAHAN

A. Peraturan Perundang-Undangan	165
B. Peraturan Kebijakan	170
1. Peristilahan	170
2. Pengertian	171
3. Ciri Peraturan Kebijakan	178
4. Tipe dan Karakteristik Peraturan Kebijakan	180

5. Dasar Kewenangan dan Alasan Pembena Pembentukan Peraturan Kebijakan	183
6. Perbedaan dan Persamaan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan	184
C. Keputusan.	183
1. Peristilahan	188
2. Keputusan secara Teoritik	188
a. Keputusan yang Sah	193
b. Keputusan yang Tidak Sah	198
3. Keputusan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1986	199
4. Keputusan Menurut RUU Administrasi Pemerintahan	224
D. Hukum Perizinan	235
1. Peristilahan	235
2. Pengertian	237

BAB IX : HUKUM KEPEGAWAIAN

A. Objek Hukum Kepegawaian	257
B. Perlunya Pegawai Negeri	258
C. Hubungan Dinas Publik	258
D. Segi Hukum Pengangkatan Pegawai Negeri	259
E. Pengertian Pegawai Negeri	261
1. Pengertian Stipulatif	261
2. Perluasan Pengertian	262
F. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri	264
1. Kedudukan Pegawai Negeri	268
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil	270
3. Sistem Karir Tertutup	270
G. Pertanggung-Jawaban Pegawai Negeri	270
1. Pertanggungjawaban Kepidanaan	270

2. Pertanggungjawaban Finansial Keuangan dan Kehartaan.....	271
H. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	274
1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	275
2. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil	276
3. Hukuman Pegawai Negeri Sipil	277
4. Upaya Administratif	278

BAB X : HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH

A. Hukum Keuangan Negara	281
1. Hubungan Keuangan Negara dan Hukum	281
2. Sejarah Keuangan Negara	282
3. Dasar Hukum	284
4. Ruang Lingkup Pengertian Keuangan Negara	285
5. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara	290
6. Presiden selaku Pengelola Keuangan Negara	290
7. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Swasta dan Badan Pengelola Dana Masyarakat	293
8. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD	293
9. Pelaksanaan APBN dan APBD	296
10. Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBN dan APBD	297
B. Hukum Perbendaharaan Negara	302
1. Dasar Hukum	302

2. Asas-asas Perbendaharaan Negara	303
3. Pejabat Perbendaharaan Negara	303
4. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	310
5. Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang dikuasai Negara dan Daerah	313
C. Penyelesaian Ganti Rugi	314

BAB XI : PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA

A. Kedudukan Hukum Pajak	317
B. Sejarah Pemungutan Pajak	318
C. Pengertian Pajak	319
D. Dasar Hukum Pajak di Indonesia	321
E. Fungsi Pajak	322
F. Macam-macam Pungutan	322
1. Retribusi	322
2. Sumbangan	323
3. Ipeda/Ireda/PBB	323
G. Timbulnya Hutang Pajak	326
H. Cara Pemungutan Pajak	327
1. Stelsel Nyata	327
2. Stelsel Anggapan	328
3. Stelsel Campuran	328
I. Sengketa Perpajakan dan Keberatan	328
J. Peradilan Pajak sebagai Peradilan Khusus	329
K. Putusan Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali	332

BAB XII : PUBLIC DOMAIN

A. Public Domain	333
1. Perbedaan Paham	334

2. Hak Menguasai oleh Negara dan Publik Domain di Indonesia	339
3. Cara Mendapatkan/Jalan Negara Menggunakan Hak Menguasai atas Benda-benda Publik Domain.....	341
B. Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah .	342
1. Arti Penting Tanah Bagi Pemerintah.....	342
2. Pencabutan Hak Atas Tanah	343
3. Pembebasan Hak Atas Tanah	345
C. Kepentingan Umum	348

DAFTAR PUSTAKA	353
-----------------------------	------------